

PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN 11% TERHADAP DAYA BELI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Lailatus Sa'adah

STIE Malangkeucecwara Malang ila@stie-mce.ac.id

Aji Cahyo Wibowo

STIE Malangkeucecwara Malang
ajicahyo1403@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Grosir Akar Gemilang di Kabupaten Malang. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% sehingga diperoleh 83 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat. Selain itu, kenaikan tarif PPN 11% juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung mampu melakukan penyesuaian terhadap kenaikan harga melalui perubahan pola konsumsi dan pengelolaan keuangan rumah tangga. Namun demikian, hasil ini lebih mencerminkan persepsi responden dan perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena dampaknya tidak merata antar kelompok masyarakat.

Kata kunci: Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai, Daya Beli, Kesejahteraan Masyarakat.

Abstract

This study aims to analyze the impact of an 11% increase in the Value Added Tax (VAT) rate on purchasing power and community welfare. The population in this study were consumers of Grosir Akar Gemilang in Malang Regency. The sample was determined using the Slovin formula with a 10% margin of error, resulting in 83 respondents. The sampling technique used purposive sampling. Data were collected through a questionnaire with a Likert scale and analyzed using simple linear regression. The results indicate that the 11% increase in the VAT rate has a positive and significant impact on purchasing power. Furthermore, the 11% increase in the VAT rate also has a positive and significant impact on community welfare. These findings indicate that the community tends to be able to adjust to price increases through changes in consumption patterns and household financial management. However, these results reflect respondents' perceptions and should be interpreted with caution as the impact is uneven across community groups.

Keywords: Value Added Tax Rate Increase, Purchasing Power, Community Welfare.

I. PENDAHULUAN

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara guna menjaga stabilitas fiskal. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menetapkan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022.

Kenaikan tarif PPN secara tidak langsung mempunyai dampak pada daya beli masyarakat. Ketika tarif PPN naik, harga-harga barang yang merupakan objek PPN juga akan mengalami kenaikan terutama barang konsumsi dan ritel. Peningkatan tarif PPN juga akan mengakibatkan jumlah uang yang dibayarkan seseorang untuk membeli produk lebih banyak dari biasanya. Daya beli masyarakat merupakan kemampuan

individu untuk membeli barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup (Pawenang, 2016). Ketika harga meningkat akibat kenaikan pajak, sementara pendapatan tetap, maka daya beli akan mengalami penurunan (Tarigan, 2018). Kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam teori ekonomi, kesejahteraan dapat dianalisis melalui konsep *Consumer Surplus*, di mana kenaikan harga akan mengurangi surplus konsumen (Gruber, 2019).

Sejumlah penelitian empiris mendukung hubungan tersebut. Penelitian oleh (Kadunci, 2023) menunjukkan bahwa secara simultan kenaikan tarif PPN 11% dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat sebesar 34,4%, meskipun secara parsial pengaruh PPN tidak signifikan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Asri, 2025) menunjukkan bahwa kenaikan PPN 11% menyebabkan penurunan frekuensi konsumsi di luar rumah dan mendorong masyarakat beralih ke pilihan yang lebih ekonomis. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak tidak hanya berdampak pada penurunan konsumsi, tetapi juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi lebih selektif dan cenderung mengurangi pembelian barang nonesensial (Pramesti & Supadmi, 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pajak memiliki implikasi luas terhadap perilaku ekonomi masyarakat.

Demikian juga penelitian oleh Hajatina (2024) yang menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) berdampak pada penurunan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Hasil ini sejalan dengan temuan World Bank (2023) yang menyebutkan bahwa pajak konsumsi seperti PPN dapat meningkatkan harga barang dan menekan tingkat konsumsi

rumah tangga, terutama pada kelompok berpendapatan rendah. Selain itu, secara teoritis kenaikan pajak konsumsi akan meningkatkan harga barang dan menurunkan surplus konsumen (*consumer surplus*), yaitu selisih antara kesediaan membayar konsumen dengan harga yang harus dibayarkan. Penurunan surplus konsumen ini mencerminkan berkurangnya kesejahteraan masyarakat, dan dampaknya lebih besar dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah karena proporsi pengeluaran konsumsi mereka lebih tinggi.

Hasil penelitian terkait dampak kenaikan PPN terhadap kesejahteraan masyarakat masih menunjukkan variasi, tergantung pada kondisi ekonomi, tingkat pendapatan, serta kebijakan kompensasi yang diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara empiris pengaruh kenaikan tarif PPN 11% terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada konsumen di Kabupaten Malang.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Daya Beli

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% berpotensi memberikan dampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa yang terkena PPN, sehingga masyarakat perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang sama menyimpulkan bahwa kenaikan PPN menyebabkan daya beli masyarakat sebagai konsumen tingkat akhir menurun. Hal ini terjadi karena naiknya harga barang/jasa seiring dengan naiknya tarif PPN (Kholis & Sulastris, 2022). Tarif PPN memiliki pengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat (Kadunci, 2023).

Indikator variabel dalam penelitian ini dijabarkan ke dalam beberapa pernyataan

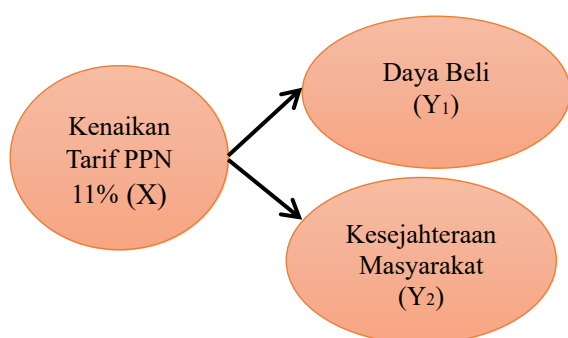
kuesioner agar setiap variabel dapat diukur secara objektif.

Variabel kenaikan tarif PPN mencakup indikator perubahan beban pajak, penyesuaian harga barang dan jasa, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi. Variabel daya beli mencakup indikator kemampuan membeli, perubahan pola konsumsi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan. Adapun variabel kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator pendapatan, pemenuhan kebutuhan hidup, kondisi konsumsi, dan kualitas hidup Masyarakat. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H₁: Kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh positif terhadap daya beli.

Pengaruh kenaikan tarif PPN 11% terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pendapatan kenaikan PPN dapat dialokasikan untuk program-program kesejahteraan seperti subsidi kesehatan, pendidikan dan perumahan. Contohnya, alokasi anggaran dari kenaikan PPN pada tahun (2022) telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan 12% (Kementerian Keuangan, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh (Viera et al., 2025) menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN 11% memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat diajukan hipotesis H₂ Kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. Model Konseptual Penelitian

2. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Grosir Akar Gemilang di Kabupaten Malang dengan jumlah rata-rata 500 orang per bulan. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2015) dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 83 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Pengambilan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuisisioner (angket penelitian) kepada objek penelitian yang diisi langsung oleh responden.

Variabel dalam penelitian terdiri dari variabel independen yaitu kenaikan tarif PPN 11% (X) dan variabel dependen yaitu daya beli (Y₁) dan kesejahteraan masyarakat (Y₂). Analisis data dilakukan menggunakan uji regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh antar variabel.

3, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Variable	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard deviation
Kenaikan tarif PPN	83	4	20	15.07	3.019
Daya beli masyarakat	83	6	20	14.16	2.800
Kesejahteraan masyarakat	83	5	20	13.73	2.618

Sumber; data diolah, 2025.

Berdasarkan Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 83 orang. Variabel kenaikan tarif PPN (X) mempunyai nilai minimum sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 20, dengan nilai rata-rata sebesar 15,07 serta standar deviasi sebesar 3,019. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar

responden merasakan adanya dampak kenaikan tarif PPN 11%.

Variabel daya beli masyarakat (Y_1) mempunyai nilai minimum sebesar 6 dan nilai maksimum sebesar 20, dengan nilai rata-rata sebesar 14,16 serta standar deviasi sebesar 2,800. Nilai tersebut mengidentifikasi bahwa daya beli masyarakat berada pada posisi sedang, namun cenderung mengalami penurunan akibat kenaikan harga barang dan jasa.

Variabel kesejahteraan masyarakat (Y_2) mempunyai nilai minimum sebesar 5 dan nilai maksimum sebesar 20, dengan nilai rata-rata sebesar 14,16 serta standar deviasi sebesar 2,618. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat relatif lebih rendah dibandingkan variabel lainnya yang mencerminkan adanya dampak terhadap kenaikan tarif PPN 11%.

Pengujian Hipotesis

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis variabel X terhadap variabel Y_1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.401	1.386		5.338	.000
	Kenaikan PPN	.448	.090	.483	4.968	.000

a. Dependent Variable: Daya Beli Masyarakat

Berdasarkan Tabel 2, dapat ditunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat ($t = 4,968$; $sig = 0,000 < 0,005$). Nilai koefisien beta sebesar 0,448, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan persepsi terhadap kenaikan tarif PPN diikuti dengan peningkatan skor pada variabel daya beli.

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis variabel X terhadap variabel Y_2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.603	1.409		6.814	.000
	Kenaikan PPN	.275	.092	.316	2.998	.004

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Tabel 3, dapat ditunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ($t = 2,998$; $sig = 0,004 < 0,005$). Nilai koefisien beta sebesar 0,316, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan persepsi terhadap kenaikan tarif PPN diikuti dengan peningkatan skor pada variabel kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Kenaikan Tarif (PPN) 11% Terhadap Daya Beli Masyarakat

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat ($t = 4,968$; $sig = 0,000 < 0,005$; $\beta = 0,448$). Artinya, semakin tinggi persepsi masyarakat terhadap kenaikan PPN, semakin tinggi pula skor daya beli yang dilaporkan responden.

Secara naratif, temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu menyesuaikan diri terhadap kenaikan harga. Beberapa strategi yang dilakukan responden antara lain:

1. Memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi pembelian barang nonesensial.
2. Beralih ke produk yang lebih ekonomis.
3. Mengelola pengeluaran rumah tangga secara lebih ketat.

Kelompok berpendapatan menengah ke atas relatif tidak terpengaruh karena fleksibilitas keuangan mereka lebih tinggi. Sebaliknya, kelompok berpendapatan rendah lebih merasakan tekanan karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk kebutuhan pokok. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak kenaikan PPN terhadap daya beli bersifat tidak merata, tergantung tingkat pendapatan dan kemampuan adaptasi masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kadunci (2023), Kholis & Sulastri (2022), dan Asri (2025), yang menyatakan bahwa pengaruh PPN terhadap daya beli dipengaruhi oleh

pendapatan dan perilaku adaptif konsumen. Secara praktis, hasil ini menekankan perlunya kebijakan yang mempertimbangkan kelompok masyarakat yang rentan.

Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil uji regresi juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan kenaikan tarif PPN terhadap kesejahteraan masyarakat ($t = 2,998$; $\text{sig} = 0,004 < 0,005$; $\beta = 0,316$). Peningkatan persepsi terhadap kebijakan PPN sejalan dengan peningkatan skor kesejahteraan responden.

Secara naratif, ini menunjukkan bahwa pendapatan negara dari PPN digunakan untuk mendanai program publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa responden melaporkan kemudahan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik setelah kenaikan PPN.

Namun, efek ini bersifat dualistik. Kelompok berpendapatan rendah tetap merasakan tekanan ekonomi dari kenaikan harga barang dan jasa, sementara kelompok berpendapatan menengah ke atas lebih mampu menyerap dampaknya. Dengan kata lain, hubungan antara kenaikan tarif PPN dan kesejahteraan masyarakat tidak linear, dipengaruhi distribusi pendapatan, efektivitas kebijakan pemerintah, dan kemampuan adaptasi masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan Gruber (2019) dan World Bank (2023), yang menyatakan bahwa pajak konsumsi meningkatkan penerimaan negara dan potensi kesejahteraan, tetapi dapat menekan konsumsi rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Secara keseluruhan, narasi ini menekankan bahwa kenaikan tarif PPN 11% memicu adaptasi sosial-ekonomi, termasuk perubahan pola konsumsi, prioritas belanja, dan strategi finansial

rumah tangga, serta memberi dampak positif pada kesejahteraan agregat melalui penerimaan negara.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat. Masyarakat menyesuaikan pola konsumsi dan pengelolaan keuangan rumah tangga untuk menghadapi kenaikan harga.
2. Kenaikan tarif PPN juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penerimaan negara yang mendukung program publik.
3. Dampak kenaikan PPN bersifat tidak merata antar kelompok masyarakat, terutama berbeda antara pendapatan rendah dan menengah ke atas.

V. REFERENSI

- Asri, P. S. (2025). *Analisis Dampak Kenaikan Ppn 11 % Terhadap Daya Beli Gen Z Di Bidang Kuliner*. 10(1).
- Gruber, J. (2019). *Public Finance and Public Policy*. Worth Publishers.
- Hajatina, U. H. (2024). TERHADAP PERILAKU KONSUMSI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI Akademi Perniagaan dan Perusahaan Apipsu , Manajemen perusahaan Fakultas bisnis dan Humainora , Universitas Tjut Nyak Dhien , Manajemen Email author : arsyie2@gmail.com
- Pendahuluan Peningkatan tar. *J. Manajemen, D. Bisnis*, 3(2), 36–51.
- Kadunci, F. &. (2023). *Pengaruh tarif ppn 11% dan tingkat pendapatan selama pandemi terhadap daya beli masyarakat*. 22(1), 8–16.
- Kholis, N., & Sulastri. (2022). *Pengaruh Insentif Pajak Dan Subsidi Upah Pandemi Covid-19 Terhadap Daya Beli Masyarakat*. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 7(1), 53–64.

- Pawengan, S. (2016). Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis. Pasca Sarajana, UNIBA
- Pramesti, S. A. P. D., & Supadmi, N. L. (2017). PENGARUH PPN, PPnBM, DAN PKB TARIF PROGRESIF PADA DAYA BELI KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT. *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18.1, 674–704.
- Prospects, I. E. (2023). *CLIMATE ACTION* (Issue December). Tarigan, R. (2018). *Ekonomi Regional*. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Viera, J. J., Hamu, A., Hungu, L., Arief, A. P., Syahrani, A. N., Siswajanthi, F., Hukum, F., & Pakuan, U. (2025). *Legal Theory PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DARI PERSPEKTIF PANCASILA 1-7*.
- World Bank. (2023). Indonesia Economic Prospects: Climate Action for Development.
<https://openknowledge.worldbank.org/>